

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan berbagai cara, termasuk menggalakkan peningkatan wirausaha di Indonesia. Kemunculan usaha-usaha baru dikarenakan oleh upaya pemerintah, disisi lain juga dikarenakan perekonomian yang tidak stabil saat ini. Usaha mikro adalah usaha yang banyak muncul belakangan ini. Hal ini dikarenakan usaha mikro memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Audretsch, Horst, Kwaak, dan Thurik, 2009; Carrter dan Jones-Evans, 2006). Secara spesifik, keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dipercaya akan mampu berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja (Carrer dan Klomp, 1996; Adomoko, Danso, dan Damoah, 2016).

Kurang optimalnya perkembangan kinerja usaha mikro disebabkan oleh kurangnya produktivitas dan permodalan usaha mikro itu sendiri. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit yang terus mengalami penurunan. Menurut Bank Indonesia (2020), pada triwulan IV 2019 kredit usaha mikro di Bali tumbuh 6,12% (yoy). Sedangkan pada triwulan IV 2020, Bank Indonesia (2021) mencatat kredit usaha mikro tumbuh hanya sebesar 1,67%. Artinya, terjadi penurunan penggunaan kredit usaha mikro oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja

usahanya. Hal ini tentu akan menghambat kinerja usaha mikro, sehingga usaha mikro sering mengalami ketertinggalan daripada usaha lainnya, seperti usaha kecil dan menengah. Kinerja usaha sendiri merupakan kemampuan suatu usaha untuk memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu ukuran dibutuhkan dalam mengukur kinerja seperti tingkat kesuksesan atau hasil pencapaian dari sebuah usaha.

Penurunan penyaluran kredit usaha mikro juga bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan pelaku usaha mikro. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan UMKM rendah. Pelaku usaha menengah memiliki tingkat literasi keuangan tertinggi, yaitu 44,7%, sedangkan pelaku usaha kecil mempunyai tingkat literasi keuangan sebesar 35,3%. Pelaku usaha mikro mempunyai tingkat literasi yang paling rendah, yaitu sebesar 23,8%. Begitupun pada tingkat inklusi keuangan, pelaku usaha menengah memiliki tingkat inklusi keuangan tertinggi, yaitu 79,3%. Pelaku usaha kecil memiliki tingkat inklusi keuangan sebesar 77,0%. Sedangkan pelaku usaha mikro memiliki tingkat inklusi keuangan lebih rendah daripada pelaku usaha lainnya, yaitu sebesar 65,3% (OJK, 2017b dalam Soetiono dan Setiawan, 2018: 156). Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh OJK (2017), bahwa ada hubungan erat antara literasi keuangan dan inklusi keuangan dengan kinerja UMKM, dikarenakan jika semakin tinggi literasi keuangan dan tingkat pemanfaatan produk serta layanan jasa keuangan pelaku usaha, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja UMKM. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan

Wuryani (2020) bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha.

Literasi keuangan adalah mengenai sejauh mana seseorang memahami konsep keuangan dan pengelolaan keuangan yang tepat sehingga ia dapat mengambil keputusan baik jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang menurut dinamika kebutuhan dan kondisi perekonomian (Hung *et al.*, 2009). Literasi keuangan yang menjadi hal dasar yang harus dipahami dan dikuasai oleh setiap individu karena berpengaruh terhadap kondisi keuangan seseorang serta memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan ekonomi yang baik dan tepat, begitupun penerapannya pada bidang usaha.

Tingkat literasi keuangan di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil SNLIK 2019 menunjukkan bahwa Bali memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 38,06%. Sedangkan pada tahun 2016, tercatat bahwa Kabuptaen Badung merupakan kabupaten dengan tingkat literasi keuangan yang tertinggi, yaitu sebesar 38,23%, sedangkan Kabupaten Gianyar memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 38%, serta Kabupaten Buleleng memiliki tingkat literasi sebesar 32,4%. Dari data tersebut Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Survei tersebut diambil dari 12.773 responden dari 34 provinsi dan 67 kabupaten dan menunjukkan tingkat literasi keuangan sebesar 38,03% (OJK, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan literasi keuangan di Kabupaten Buleleng, terutama kepada usaha mikro agar dapat meningkatkan kinerja usahanya. Sedangkan survey Bank Indonesia menyatakan bahwa literasi keuangan pelaku usaha mikro masih rendah, berada pada angka 36% pelaku usaha

mikro yang memahami seberapa pentingnya literasi keuangan (Bank Indonesia, 2015). Literasi keuangan pelaku usaha mikro di Kabupaten Buleleng pun masih tergolong rendah, yaitu berada di angka 32% pelaku UMKM yang memahami tentang literasi keuangan. Artinya, sebesar 68% pelaku usaha UMKM tidak memahami tentang literasi keuangan. Maka dari itu, perlu adanya pemberdayaan terhadap usaha mikro terkait literasi keuangan.

Financial inclusion (inklusi keuangan) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Halim Alamsyah, 2015). Soetiono dan Setiawan (2018) juga mengemukakan bahwa keberhasilan usaha mikro tidak hanya dipengaruhi faktor kemampuan dalam menciptakan serta memasarkan produk kreatif, melainkan pemanfaatan produk jasa keuangan juga menjadi bagian yang berperan penting dalam keberlangsungan usaha mikro. Berdasarkan hasil SNLIK pada tahun 2019 menunjukkan indeks inklusi keuangan berada pada angka 76,19%. Indeks inklusi keuangan Provinsi Bali terbilang cukup tinggi berada pada 92,91%. Kota Denpasar memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 84,2%, sedangkan Kabupaten Buleleng memiliki indeks inklusi keuangan lebih rendah, yaitu 68,3% (OJK, 2019). Maka dari itu, masih perlu dilakukan peningkatan indeks inklusi keuangan di Kabupaten Buleleng agar tidak terjadi ketimpangan dengan kabupaten/kota lain di Bali. Tidak hanya itu, peningkatan indeks inklusi keuangan juga perlu diprioritaskan kepada usaha mikro untuk meningkatkan kinerja usahanya.

Di sisi lain, literasi keuangan juga mampu mempengaruhi inklusi keuangan. Soetiono dan Setiawan (2018: 26), menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan

yang tinggi akan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pengelolaan dan perencanaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan produk keuangan. Sadar akan pentingnya pengelolaan dan perencanaan keuangan, membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai keuangannya. Masyarakat akan lebih meningkatkan akses penggunaan produk keuangan yang sederhana, seperti tabungan (*saving behavior*) dan pinjaman. Hal ini, menunjukkan semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka semakin tinggi pula akses penggunaan produk keuangannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Odetayo, Sajuyigbe, dan Adeyemi (2020), bahwa terdapat hubungan positif literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng. Desa Baktiseraga merupakan salah satu desa yang berbeda di Kecamatan Buleleng dengan luas wilayah 1,51 km² yang memiliki jumlah penduduk 6.257 jiwa. Pekerjaan penduduk di desa ini didominasi sebagai wirausaha dengan usaha mikro. Namun, rendahnya literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro yang belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha mikro yang masih merasa kekurangan modal untuk memperluas usahanya. Sehingga banyak usaha mikro di sepanjang jalan desa yang masih sulit berkembang. Pelaku usaha mikro memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Rata-rata tingkat pendidikan pelaku usaha mikro di Desa Baktiseraga ini adalah Sekolah Dasar (SD).

Berdasarkan data yang diambil dari *website* masing-masing desa di Kecamatan Buleleng, besarnya presentase masyarakat yang tamat SD/ sederajat di

Desa Baktiseraga pada tahun 2020, yaitu 27,77% dan presentase tingkat pendidikan lainnya lebih rendah, sedangkan pada tahun 2020 di Desa Anturan presentase masyarakat tamat SD/ sederajat adalah sebesar 26,78%. Di Desa Tukadmungga presentase masyarakat tamat SD/ sederajat adalah 26,09% dan di Desa Alasanger presentase masyarakat tamat SD/ sederajat ialah sebesar 26,19 pada tahun 2020. Artinya rata-rata tingkat pendidikan di Desa Baktiseraga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tamat SD/ sederajat di Desa Baktiseraga dibandingkan desa lainnya. Tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dimiliki cukup rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa pelaku usaha mikro, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tidak memiliki kinerja yang terstruktur untuk mengembangkan usahanya. Instrumen keuangan yang diketahui oleh pelaku usaha mikro hanya sebatas tabungan dan fasilitas kredit saja, baik yang ditawarkan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Begitupun dengan ketersediaan akses layanan jasa keuangan, sebagian besar pelaku usaha mikro belum mengetahui secara jelas bagaimana cara mengaksesnya. Pernyataan dari para pelaku usaha mikro tersebut jelas memberikan arti bahwa tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan dari pelaku usaha mikro masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kinerja usaha mikro.

Berdasarkan survei pendahuluan dengan beberapa pelaku usaha, ada pula pelaku usaha yang tidak mengetahui benar mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan, tetapi bisa mengelola keuangan usaha dengan baik sehingga kinerja

usaha meningkat. Ada pula pelaku usaha yang mengetahui mengenai literasi keuangan, namun tidak memiliki akses keuangan dengan baik ke lembaga keuangan dikarenakan tidak adanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mampu memberikan akses kredit termudah bagi warga adat setempat dan pada lembaga keuangan lainnya memerlukan jaminan setiap melakukan peminjaman dana, baik pinjaman skala besar maupun pinjaman skala kecil. Sehingga masyarakat memiliki rasa khawatir jika tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan. Terlebih disituasi pandemi seperti sekarang ini. Sesuai dengan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat belum atau kurang menggunakan produk dan layanan keuangan dari sisi penawaran, yaitu kendala regulasi (Soetiono dan Setiawan, 2018: 33). Hal ini tentu tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2020) bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan, maka semakin tinggi pula perkembangan kinerja usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait permasalahan yang terjadi mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha, terjadi kesenjangan antara penelitian terdahulu dan data di lapangan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut.

- (1) Pemahaman pelaku usaha mikro terkait literasi keuangan masih rendah.

- (2) Pengetahuan pelaku usaha mikro terhadap inklusi keuangan masih tergolong rendah.
- (3) Pelaku usaha mikro di Desa Baktiseraga belum memiliki kinerja usaha yang optimal.
- (4) Adanya kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan data di lapangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dibuat agar penelitian ini berfokus pada pengaruh variabel literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

- (1) Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng?
- (2) Apakah terdapat pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng?
- (3) Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng?
- (4) Apakah inklusi keuangan memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Menguji pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng.
- (2) Menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng.
- (3) Menguji pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng.
- (4) Menguji inklusi keuangan memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- (1) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk pengembangan ilmu dibidang manajemen, khususnya manajemen keuangan mengenai pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha.

- (2) **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng. Selain itu, dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja usaha mikro di Desa Baktiseraga.